

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. X, No. 1 Juli 2023
DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2022

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

Lukfiah Irwan Radjak[1] , Mohamad Recky Widianto Hasan[2]
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; reckywidianto@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 27 Juli 2023, Disetujui: 7 Agustus 2023, Publish 15 Agustus 2023

Abstract:
This research aims to determine financial performance by looking at reports on budget realization from the Health Office of Gorontalo Regency. This research uses a descriptive quantitative method with techniques of observation, documentation, and analysis of regional financial ratios. The results indicated the ratio of independence is consistent with the percentage of 100%. In the effectiveness ratio, the activity ratio fluctuates with the ineffective category. In the independent ratio of PAD growth and income growth also fluctuated. Finally, the compatibility ratio for routine spending and capital spending also fluctuated, with the highest percentage respectively in 2017 with the highly compatible category and in 2021 with the less compatible category. The financial performance of the Health Office of Gorontalo regency in the past five years, if assessed using several ratios as a whole, it can be said that the financial performance has not been successful.

Keywords: *Financial Statement Analysis, LRA, Financial Performance.*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan melihat laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriftif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian konsisten dengan persentase 100%. Pada rasio efektivitas rasio aktivitas mengalami fluktuasi dengan kategori tidak efektif. Pada rasio kemandirian pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan juga mengalami fluktuasi. Terakhir pada rasio keserasian belanja rutin dan belanja modal juga mengalami fluktuasi dengan masing-masing persentase tertinggi ada pada tahun 2017 dengan kategori sangan serasi dan pada tahun 2021 dengan kategori kurang serasi. Kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun kebelakang jika dinilai menggunakan beberapa rasio secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja keuangannya belum berhasil.

Kata kunci : Analisis Laporan Keuangan, LRA, Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Secara mendasar dapat dijelaskan bahwa laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang baik mengenai prospek dan resiko perusahaan (Septiana 2019:12).

Sesuai dengan PSAP Nomor 1 Tahun 2015 secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan menunjukkan akuntabilitas ekuitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Jenis-jenis laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses identifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiyaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar LRA menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiyaan dengan anggarannya.

Pemerintah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Menurut (Nurfadilah 2018) Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja yang dilihat dari aspek laporan realisasi anggaran, yang merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja organisasi serta prestasi (keberhasilan) suatu organisasi bagi pihak pihak yang berkepentingan. Sehingga penilaian kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran.

Salah satu SKPD yang berada di Gorontalo adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp 29.331.171.139. Dimana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 150.061.895.261 namun yang terealisasi sebesar 134.393.006.400 sehingga presentasinya sebesar 89,56 %. Pada LRA tahun 2020, akun dengan realisasi terendah antara lain akun pada pendapatan retribusi daerah dengan presentasi sebesar 64,01 % dan pada akun belanja modal gedung dan bangunan sebesar 63,10%. Setelah dilakukan ovservasi awal, penyebab pendapatan retribusi menurun kerena retribusi uji kualitas air yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah di depot-depot kurang maksimal dikarenakan banyak depot air mineral yang tutup akibat pandemi covid-19. Sama halnya dengan belanja modal gedung dan bangunan dimana presentasi realisasinya hanya sebesar 63,10%. Ini juga disebabkan adanya pandemi covid-19 dimana angaran tidak terealisasi dengan baik dikarenakan adanya refocussing yaitu memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran dalam hal ini dilakukan untuk penanganan covid-19.

Berdasarkan latar beakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan melihat laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif.

Penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau terjadi saat itu juga, sehingga dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2012). Penemuan data merupakan gambaran atau gambaran realisasi. Penerapan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan laporan realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal (Anggito and Setiawan 2018:7). Analisis deskriptif berisi penjelasan serta pemaparan dilakukan dengan cara menjelaskan rumus-rumus dengan kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya untuk memeperoleh kesimpulan. Sedangkan Metode kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas keserasian belanja.

Rasio Kemandirian

Menurut (Patarai 2016:216), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD rasio kemandirian.

$$\frac{\boldsymbol{Pendapatan\ asli\ daerah\ (PAD)}}{\boldsymbol{Sumber\ pendapatan\ dari\ pihak\ ekstern}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Menurut (Patarai 2016:216), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah.

$$\boldsymbol{Efektivitas} = \frac{\boldsymbol{Realisasi\ penerimaan\ PAD}}{\boldsymbol{Target\ PAD}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang mengambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Patarai 2016:216).

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ yang\ dikeluarkan\ untuk\ memungut\ PAD}{Realisasi\ penerimaan\ PAD}\ x\ 100\%$$

Rasio Aktivitas

Menurut (Patarai 2016:216), rasio ini menggambarkan bagamana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi danannya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana belanja pembangunan yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentasi belanja investasi/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$Rasio\ Aktivitas = \frac{Total\ belanja\ rutin}{Total\ APBD}\ x\ 100\%$$

$$Rasio\ Aktivitas = \frac{Total\ belanja\ modal}{Total\ APBD}\ x\ 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Menurut (Patarai 2016:216), rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah/pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan).

$$\frac{Realisasi\ penerimaan\ Xn - Xn - 1}{Realisasi\ penerimaan\ Xn - 1}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Xn = tahun yang dihitung

Xn-1 = tahun sebelumnya

Rasio Aktivitas Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja Rutin

Rasio keserasian merupakan rasio yang akan mengukur besarnya persentasi penggunaan anggaran baik belanja pegawai (rutin) maupun belanja publik atau belanja modal. Semakin tinggi persentasi anggaran yang dialokasian untuk belanja rutin berarti persentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil, demikian sebaliknya (Ariadi 2021:46). Adapun rasio tersebut adalah:

$$Aktivitas = \frac{Belanja\ rutin/pegawai}{Total\ belanja}\ x\ 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja Modal

Keserasian belanja modal atau belanja publik merupakan persentasi hasil pengukuran dari besarnya anggaran belanja modal (belanja publik) terhadap total belanja daerah. Keserasian tersebut standar yang

menjadi tolak ukur tepat untuk menentukan keseimbangan belanja modal maupun belanja rutin belum ada yang pasti untuk menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun modal terhadap anggaran pendapatan belanja maupun anggaran pendapatan ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Ariadi 2021:47).

$$Aktivitas = \frac{Belanja\ modal}{Total\ belanja}\ x\ 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo diperoleh bahwa:

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingan total PAD dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, maka rasio kemandirian Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Ket
2017	.24.431.045.030	24.431.045.030	100%	Delegatif
2018	24.129.955.489	24.129.955.489	100%	Delegatif
2019	1.487.418.488	1.487.418.488	100%	Delegatif
2020	233.836.599	233.836.599	100%	Delegatif
2021	689.814.806	689.814.806	100%	Delegatif

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa rata-rata kemandirian Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sebesar 100%. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dikategorikan sangat baik sebagaimana berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah menurut (Halim 2010) dimana 75%-100% pola hubungan Delegatif atau kriteria tinggi.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan Anggaran pendapatan daerah. Berikut adalah perhitungan rasio efektivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2020.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	24.431.045.030	20.240.606.481	120,77%	Efektif
2018	24.129.955.489	24.295.443.098	99,32%	Tidak Efektif
2019	1.487.418.488	9.697.548.473	15,34%	Tidak Efektif
2020	233.836.599	348.964.000	67,01%	Tidak Efektif
2021	689.814.806	484.964.000	142,24%	Efektif

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa tahun 2019 adalah rasio efektivitas terendah dengan persentasi hanya 15,34% pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu dari tahun 2017-2021. Ini terjadi karena pada tahun 2019 pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten gorontalo terkena dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan melemahnya perekonomian.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD atau realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Berikut adalah perhitungan rasio efisiensi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2017	88.569.080.437	24.431.045.030	362,53%	Tidak Efisien
2018	107.234.293.659	24.129.955.489	444.40%	Tidak Efisien
2019	120.672.820.507	1.487.418.488	8.112,90%	Tidak Efisien
2020	134.626.842.999	233.836.599	57.573,04%	Tidak Efisien
2021	207.724.477.275	689.814.806	30.113,08%	Tidak Efisien

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, rasio efisiensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dari tahun 2017-2018 dapat dikatakan tidak efisien. Persentasi terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 362,53%, dan untuk persentase tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 57.573,04%. Dengan hasil diatas dapat dinilai berdasarkan kriteria penilaian menurut (Mahsun, 2012:19) dimana persentasi lebih dari 100% dapat dikategorikan tidak efisien.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Aktivitas Belanja Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Rutin	Rasio Aktivitas Belanja Rutin
2017	88.569.080.437	81.114.301.257	91,58%
2018	107.234.293.659	86.211.919.724	80,40%
2019	120.672.820.507	97.756.643.295	81,01%
2020	134.860.679.598	106.029.659.227	78,76%
2021	207.724.477.275	120.484.512.266	58,00%

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Dari tabel 4 diatas, perhitungan aktivitas belanja rutin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2020 persentase terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 58,00%, sedangkan persentase tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 91,58%. Hal ini relatif lebih besar di bandingakn belanja modal tahun 2017-2021. Pada umumya proporsi Belanja Operasi

mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Tabel 5. Rasio Aktivitas Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Aktivitas Belanja Rutin
2017	88.569.080.437	7.454.779.180	8,42%
2018	107.234.293.659	21.022.373.935	19,60%
2019	120.672.820.507	22.916.177.212	18,99%
2020	134.860.679.598	28.597.183.772	21,24%
2021	207.724.477.275	87.239.965.009	42,00%

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Sementara untuk rasio aktivitas belanja modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalotahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 5 diatas, dari perhitungan rasio aktivitas belanja modal persentase terendah adalah tahun 2017 dengan persentase 8,42%. Sedangkan persentase tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 42,00%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan cara membandingkan antara selisih dari realisasi penerimaan PAD tahun ini dan sebelumnya dengan realisasi penerimaan PAD tahun ini. Berikut adalah perhitungan rasio pertumbuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2020:

Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan PAD Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD Xn - Xn-1	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	1.499.869.652	22.931.175.378	6,54%	Tidak Berhasil
2018	-301.089.541	24.431.045.030	-1,23%	Tidak Berhasil
2019	-22.642.537.001	24.129.955.489	-93,48%	Tidak Berhasil
2020	-1.253.581.889	1.487.418.488	-84,28%	Tidak Berhasil
2021	455.978.207	233.836.599	195,00%	Berhasil

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas, rasio pertumbuhan PAD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021 megalami fluktuasi dengan nilai negatif dimana persentase terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -93,48% diakibatkan covid 19 yang menyebabkan PAD dalam hal ini pendapatan retribusi uji kualitas air di depot-depot mengalami penurunan. Sedangkan untuk persentasi tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 195,00%.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Xn - Xn-1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Xn-1	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	1.499.869.652	22.931.175.378	6,54%	Tidak Berhasil
2018	-301.089.541	24.431.045.030	-1,23%	Tidak Berhasil
2019	-22.642.537.001	24.129.955.489	-93,48%	Tidak Berhasil
2020	-1.253.581.889	1.487.418.488	-84,28%	Tidak Berhasil
2021	455.978.207	233.836.599	195,00%	Berhasil

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Rasio pertumbuhan pendapatan ini sama dengan perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Berdasarkan tabel 7 di atas, rasio pertumbuhan pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

tahun 2017-2021 megalami fluktuasi dengan nilai negatif dimana persentase terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -93,48% diakibatkan covid 19 yang menyebabkan PAD mengalami penurunan dtrastis yang berpengaruh pada pendapatan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk persentasi tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 195,00%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Operasional Xn - Xn-1	Realisasi Belanja Operasional Xn-1	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	27.402.874.223	53.711.427.034	51,02%	Kurang Berhasil
2018	5.097.618.467	81.114.301.257	6,28%	Tidak Berhasil
2019	11.544.723.571	86.211.919.724	13,39%	Tidak Berhasil
2020	8.273.015.932	97.756.643.295	8,46%	Tidak Berhasil
2021	14.454.853.039	106.029.659.227	13,63%	Tidak Berhasil

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas, rasio pertumbuhan belanja operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Persentasi terendah adalah tahun 2018 senilai 20,28% dengan kategori tidak berhasil. Sementara persentase tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 51,02% dapat dikategorikan cukup berhasil. Sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat pertumbuhan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa presentasi sebesar 30% ke bawah dapat dikategorikan tidak berhasil dan 30%-55% dikategorikan kurang berhasil.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Modal Xn - Xn-1	Realisasi Belanja Modal Xn-1	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	-4.029.437.720	11.484.216.900	-35,09%	Tidak Berhasil
2018	13.567.594.755	7.454.779.180	182,00%	Sangat Berhasil
2019	1.893.803.277	21.022.373.935	9,01%	Tidak Berhasil
2020	5.681.006.560	22.916.177.212	24,79%	Tidak Berhasil
2021	58.624.781.237	28.597.183.772	205,06%	Sangat Berhasil

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 9 di atas, sama halnya dengan rasio pertumbuhan belanja operasional, rasio pertumbuhan belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021 juga mengalami fluktuasi. Persentase terendah ada pada tahun 2017 dimana persentasenya hanya di angka negatif sebesar -35,09%. Kemudian untuk persentase tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 205,06% mengalami pertumbuhan dua kali lipat.. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja modal masih ada yang tidak berhasil namun ada juga yang sangat berhasil dengan mencapai persentase di atas 100%.

Rasio Aktivitas Keserasian Belanja

Rasio aktivitas keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi anggaran yang dimiliki pada belanja Operasi dan juga belanja modal secara optimal. Dalam mengukur keserasian belanja ini dapat menggunakan dua rasio yaitu:

Rasio Keserasian Belanja Rutin

Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Rutin	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	88.569.080.437	81.114.301.257	91,58%	Sangat Serasi
2018	107.234.293.659	86.211.919.724	80,40%	Sangat Serasi
2019	120.672.820.507	97.756.643.295	81,01%	Sangat Serasi
2020	134.860.679.598	106.029.659.227	78,76%	Serasi
2021	207.724.477.275	120.484.512.266	58,00%	Cukup Serasi

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Dari tabel 10 diatas, perhitungan keserasian belanja rutin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2020 persentasi terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 58,00% dengan kategori cukup serasi. sedangkan persentase tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 91,58% dengan kategori sangat serasi.

Rasio Keserasian Belanja Modal

Tabel 11. Rasio Keserasian Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
2017	88.569.080.437	7.454.779.180	8,42%	Tidak Serasi
2018	107.234.293.659	21.022.373.935	19,60%	Tidak Serasi
2019	120.672.820.507	22.916.177.212	18,99%	Tidak Serasi
2020	134.860.679.598	28.597.183.772	21,24%	Tidak Serasi
2021	207.724.477.275	87.239.965.009	42,00%	Kurang Serasi

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 11 di atas, rasio keserasian belanja modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalotahun 2017-2021 persentasi terendah adalah tahun 2017 dengan persentase 8,42% dengan kategori tidak serasi. Sedangkan persentase tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 42,00% dengan kategori cukup serasi.

Pembahasan

Rasio kemandirian

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 memang belum maksimal dalam segi realisasi pendapatan, penyebabnya adalah terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan, walaupun setiap tahunnya Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencoba untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaannya dan memperbaiki masalah-masalah diberbagai sektor seperti bagaimana memaksimalkan penerimaan PAD. Dilihat dari trend rasio kemandirian pada tabel 10 bahwa kemandirian Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 selalu berada di angka 100%. Artinya Dinas Kesehatan sama sekali tidak menerima pendapatan dari pihak eksternal atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat dilihat dari laporan realisasi anggaran lima tahun kebelakang.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dikategorikan sangat baik sebagaimana berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah menurut (Halim 2012), dimana 75% - 100% pola hubungan Delegatif atau kriteria tinggi. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan tidak bergantung pada pemerintah daerah, Dinas

Kesehatan hanya menerima pendapatan dari sumber internal yaitu dari pendapatan retribusi daerah – LRA dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 dan 2020 masih kurang baik diukur dari rasio efektivitas dengan membandingkan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan. Angaran PAD tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 9.697.548.473 dan yang terealisasi hanya sejumlah Rp.1.487.418.488 dengan persentasi sangat rendah sebesar 15,34%. Sementara untuk anggaran PAD yang telah dianggarkan pada tahun 2020 sejumlah Rp. 348.964.000, dan yang terealisasi hanya Rp. 233.836.599 dengan persentasi sebesar 67,01%.

Kinerja keuangan dari tahun 2017-2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tidak efisien diukur dari rasio efisiensi karena menunjukan presentasi diatas 100%. Hal ini disebabkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatannya.

Rasio Aktivitas

Kinerja keuangan dinilai dengan rasio aktivitas belanja rutin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahu 2017-2021 masih dapat dikategorikan lebih baik karena persentasi aktivitas belanja rutin lebih besar dengan dibandingkan belanja modal. Sebaliknya untuk kinerja keuangan yang dinilai dengan rasio aktivitas belanja modal belum maksimal. Sebagai contoh yang paling signifikan adalah rasio aktivitas belanja rutin pada tahun 2017 mencapai persentasi sebesar 91,58% ini merupakan persentasi tertinggi dari 5 tahun terakhir. Sementara untuk rasio aktivitas belanja modal hanya sebesar 8,42% dan merupakan persentasi terendah dari 5 tahun terakhir untuk rasio aktivitas belanja modal.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD

Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dari tahun 2017-2020 dinilai dari rasio pertumbuhan pendapatan PAD masih dikategorikan tidak berhasil. Penyebab ketidak berhasilan pertumbuhan pendapatan PAD ini disebabkan oleh covid-19 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sementara untuk tahun 2021 dapat dikategorikan berhasil.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Sama halnya dengan rasio pertumbuhan pendapatan PAD. Hal ini terjadi karena sumber pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021 seluruhnya bersumber pada pendapatan PAD. Pada rasio pertumbuhan pendapatan juga untuk tahun 2017-2018 dapat dikategorikan tidak berhasil. Namun

untuk tahun 2021 sudah dapat dikategorikan berhasil karena realisasi anggaran tahun tersebut hampir dua kali lipat dari anggaran yang telah direncanakan.

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional

Untuk rasio pertumbuhan belanja operasional atau belanja rutin pada Dinas Kesehatan tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2017 memiliki persentase sebesar 51,02% dengan kategori kurang berhasil dimana realisasi pada tahun sebelumnya sejumlah Rp.53.711.427.034 sementara untuk realisasi tahun 2017 adalah sejumlah Rp.81.114.301.257.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Sama seperti rasio pertumbuhan belanja operasional atau belanja rutin, rasio belanja modal pada Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan mencapai persentase yang sangat rendah sebesar -35,09% dengan kategori tidak berhasil dimana realisasi pada tahun sebelumnya sejumlah Rp. 11.484.216.900, sementara untuk realisasi tahun 2017 adalah sejumlah Rp. 7.454.779.180**.**

Rasio Aktivitas Keserasian Belanja

Untuk rasio rasio keserasian belanja rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase aktivitas belanja rutin berada pada 91,58% dengan kategori sangat serasi. Hal ini terlihat pada realisasi anggaran belanja rutin adalah sejumlah Rp. 81.114.301.257, sedangkan untuk total belanja adalah sejumlah Rp. 88.569.080.437. Pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dianggka 80,40% dengan kategori sangat serasi. Dimana ini dapat dilihat pada realisasi belanja rutin sejumlah Rp. 86.211.919.724 sementara untuk total belanja sejumlah Rp. 107.234.293.659.

Untuk rasio rasio keserasian belanja modal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase aktivitas belanja modal berada pada 8,42% dengan kategori tidak serasi. Hal ini terlihat pada realisasi anggaran belanja modal adalah sejumlah Rp. 7.454.779.180, sedangkan untuk total belanja adalah sejumlah Rp. 88.569.080.437. Pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan diangka 19,60% dengan kategori sangat serasi. Dimana ini dapat dilihat pada realisasi belanja rutin sejumlah Rp.21.022.373.935, sementara untuk total belanja tahun tersebut adalah sejumlah Rp. 107.234.293.659.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan rasio keuangan, diperoleh bahwa kinerja keuangan pada Dinas

Kesehatan kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 masih belum sepenuhnya maksimal akibat dari covid-19 yang berdampak pada terdapat tidak maksimalnya pendapatan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan pada tahun 2020, Dan juga terdapat recofusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk solusi dari dampak covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan rasio-rasio yang telah dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan pada tahun 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A, and Johan, S. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. edited by E. D. Lestari. Jawa Barat: CV Jejak.

Ariadi, W. 2021. Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis. edited by T. Yulianti. Yogyakarta: Budi Utama.

Bahri, S. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dan IFRS. (Edisi III). edited by R. Indra. Yogyakarta: ANDI.*

Basri, R. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal EMBA 1(4):202–12.

Basir, C. 2020. Konstruksi Yudidis Penerapan Uang Paksa (DWANGSOM) Sebagi Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam. edited by Rendy. Jakarta: PREDANA MEDIA GRUP.*

Dien, N. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung."3(1):2009–13.

Effendi, S. 2021. Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD). Malang: CV Batam Publisher.*

Efendi, H. F; Zahro I. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Menara Ilmu XIV(April 2020):51–62.

Fauzi, A, and Rusdi H. N. 2020. Manajemen Kinerja. Surabaya: Airlangga University Press.*

Fitra, H. 2019. Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. edited by A. Wibowo. Malang: CV IRDH.*

Firdayanti. 2020. Analisis Laporan Realalisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.

Firdausy, C. M. 2017. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. edited by Rahmatia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Halim, A, 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hartati, Andi, Herny C. F, Enita, B., and Frist O.F. 2022. Pengukuran Kinerja sektor Publik: Teori Dan Aplikasi. edited by M. W. N. Manafe. Bandung, Jawa Barat:

CV Media Sains Indonesia.*

Hartono, Lakharis I, Husaini S. A, Widiasmara A, and Dhany U. R. 2021. Akuntansi Sektor Publik. edited by S. Bahri. Bandung, Jawa Barat: Media Sains Indonesia.*

Hidayat, W. W. 2018. Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan. edited by F. Febri. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ismail. 2020. Pengukuran Kinerja SDM. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

Kawatu, F.S. 2019. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. edited by G. D. Ayu. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Khusaini, M. 2018. Keuangan Daerah. edited by Tim UB Press. Malang: UB Press.

Kristiyanti, M. 2012. Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika 3(3):

Machmud, J, and Radjak L. I. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal of Accounting Science 2(1):17–32.

Mahsun, M. 2012. Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi, 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN: Yogyakarta

Mardiasmo. 2018. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. edited by Mardiasmo. Yogyakarta: ANDI.

Nuraini, R. 2018. Analisis Efesiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Pada Tahun 2011-2015. Skripsi a Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 1–11.

Nurfadillah, A. I. 2018. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.

Patarai, M. I. 2015. Kinerja Keuangan Daerah. Malang: A. Emil Mattotorang.

Patarai, M. I. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar). edited by M. Andries. Makassar: De La Macca.

Rismawati, and Mattalata. 2018. Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan. Celebes Media Perkasa.

Sari, I. P. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sumargo, B. 2020. Teknik Sampling. Jakarta Timur: UNJ Press.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung, Jawa Barat.

Septiana, A. 2019. Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar Dan Deskripsi Laporan Keuangan. edited by R. Hermawan. Jakarta Timur: Duta Media Publishing.

Sinaga, O. S, Hasibuan A, Priyojadmiko E. E, Butarbutar M, Purba S, Karwanto Silalahi K. M, Hidayatulloh A. N, and Muliana. 2020. Manajemen Kinerja Dalam Organisasi. edited by J. Simarmata. Yayasan Kita Menulis.

Supardan, H. 2020. Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah. edited by Tim MNC Publishing. Malang: Media Nusa Creative.

Wirono, B. 2022. Hegemoni Regulatif Dan Diskursus Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. edited by A. I. Kusdewanti. Malang: Anggota IKAPI.